

## Jurnal Konstruksi dan Rekayasa Sipil

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jkrs>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

# Analisis Ketersediaan Infrastruktur Dasar di Daerah Perbatasan Negara Indonesia dan Papua Nugini

Suparjo (1\*)

(1) Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Papua, Indonesia.

Penulis Koresponden. Suparjo  
E-mail: [suparjocrb571@gmail.com](mailto:suparjocrb571@gmail.com)

### Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

### Abstrak

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara simbol pembangunan negara yang diwujudkan melalui keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Kampung Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Hipotesis yang diangkat adalah bahwa pembangunan PLBN belum sepenuhnya berdampak pada pemberdayaan masyarakat lokal.

**Metode Penelitian:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa survei persepsi masyarakat, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah sekitar PLBN Skouw, dengan partisipan berasal dari warga Kampung Wutung yang terdampak langsung oleh pembangunan tersebut.

**Hasil dan Pembahasan:** Temuan menunjukkan bahwa PLBN lebih berfungsi sebagai simbol negara daripada sebagai instrumen pembangunan yang memberdayakan masyarakat lokal. Masyarakat masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar, akses layanan publik yang rendah, dan minimnya keterlibatan dalam aktivitas ekonomi lintas batas. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara narasi pembangunan nasional dan kenyataan lokal.

**Implikasi:** Penelitian merekomendasikan perlunya reformulasi fungsi PLBN menjadi lebih inklusif dan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan kampung, serta pengembangan model pembangunan berbasis komunitas untuk mewujudkan keadilan spasial di kawasan perbatasan.

**Kata Kunci:** perbatasan; PLBN Skouw; kesenjangan pembangunan; kebutuhan dasar; masyarakat lokal.

## Pendahuluan

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan salah satu prioritas strategis dalam kebijakan pembangunan nasional Indonesia. Wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai halaman depan negara yang merepresentasikan kedaulatan nasional, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong integrasi ekonomi, sosial, dan budaya

antarnegara. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan memerlukan pendekatan yang komprehensif, salah satunya melalui penyediaan infrastruktur dasar yang layak dan berkelanjutan. Salah satu wilayah perbatasan yang menjadi perhatian adalah Kampung Wutung, yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kampung ini merupakan wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan menjadi bagian penting dari kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, yang merupakan salah satu dari tujuh PLBN yang dibangun pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat wilayah perbatasan. PLBN Skouw telah mengalami modernisasi signifikan sejak tahun 2017, dan kini menjadi simpul penting dalam aktivitas perdagangan, mobilitas manusia, serta interaksi sosial budaya antara Indonesia dan Papua Nugini.

Namun demikian, di balik kemegahan pembangunan fisik PLBN Skouw, masyarakat lokal di sekitar kawasan perbatasan, termasuk Kampung Wutung, masih menghadapi berbagai tantangan mendasar dalam aspek ketersediaan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar yang dimaksud mencakup layanan jalan dan transportasi, air bersih, sanitasi, listrik, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta jaringan komunikasi. Aksesibilitas ke wilayah ini masih terbatas, khususnya di luar area PLBN, dengan kualitas jalan yang belum sepenuhnya memadai, distribusi air bersih yang belum menjangkau seluruh rumah tangga, keterbatasan layanan kesehatan yang hanya mengandalkan Puskesmas dengan sumber daya terbatas, serta minimnya fasilitas pendidikan menengah yang layak. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antara infrastruktur negara yang bersifat simbolik dan pelayanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan masih didominasi oleh pendekatan top-down yang menekankan aspek pertahanan dan keamanan negara, sementara kebutuhan riil masyarakat perbatasan kerap terabaikan. Akibatnya, masyarakat perbatasan sering kali merasa terpinggirkan dan mengalami kualitas hidup yang jauh tertinggal dibandingkan masyarakat di wilayah perkotaan lainnya.

Selain itu, wilayah perbatasan seperti Wutung juga menghadapi tantangan geografis dan sosial-budaya yang kompleks. Medan yang sulit, jarak tempuh yang jauh dari pusat kota Jayapura, serta keterbatasan sumber daya manusia lokal menambah kompleksitas dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Belum lagi faktor keamanan lintas batas, perubahan iklim, dan dinamika sosial ekonomi yang cepat turut memengaruhi keberlanjutan layanan infrastruktur yang sudah ada. Pembangunan infrastruktur dasar yang tidak mempertimbangkan konteks lokal berisiko menciptakan aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal atau bahkan terbengkalai. Di sisi lain, potensi kawasan perbatasan Wutung sangat besar jika didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai. Letaknya yang strategis menjadikannya sebagai simpul perdagangan lintas negara yang potensial. Kehadiran pasar perbatasan, jalur logistik, serta aktivitas lintas batas dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan jika ditopang oleh sistem infrastruktur yang mendukung mobilitas dan konektivitas masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Berangkat dari latar belakang tersebut, perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai ketersediaan dan kondisi infrastruktur dasar di wilayah perbatasan Wutung, Jayapura, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan infrastruktur, tantangan dalam penyediaan layanan dasar, serta peluang perbaikan ke depan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan

kebijakan pembangunan wilayah perbatasan yang tidak hanya bersifat simbolik dan nasionalistik, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat lokal dan mendukung penguatan posisi strategis wilayah perbatasan Indonesia di mata dunia.

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian dan Ruang Lingkup Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar merupakan elemen penting dalam mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurut World Bank (1994), infrastruktur dasar meliputi sarana dan prasarana yang mendukung fungsi dasar masyarakat seperti jalan, air bersih, sanitasi, energi, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur ini menjadi syarat utama tercapainya kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan antarwilayah (Todaro & Smith, 2012). Dalam konteks wilayah perbatasan, keberadaan infrastruktur dasar tidak hanya menjadi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, tetapi juga menjadi alat strategis untuk memperkuat kehadiran negara dan meningkatkan konektivitas antarnegara (BNPP, 2020). Infrastruktur yang baik memungkinkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, serta memperkuat akses terhadap pelayanan publik dasar.

### Wilayah Perbatasan: Karakteristik dan Tantangan

Wilayah perbatasan adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, wilayah perbatasan merupakan bagian dari wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki fungsi strategis dalam pertahanan dan keamanan nasional. Namun, wilayah ini umumnya memiliki tantangan pembangunan yang signifikan, antara lain isolasi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah (Hudalah et al., 2016). Penelitian oleh Arifin (2015) menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di kawasan timur seperti Papua, masih tertinggal dibandingkan wilayah tengah dan barat. Ketimpangan ini diperparah dengan kurangnya integrasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal, serta keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan lintas sektor.

### Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah membangun dan merevitalisasi sejumlah PLBN sebagai simbol kehadiran negara di kawasan perbatasan. PLBN Skouw di Jayapura merupakan salah satu dari tujuh PLBN utama yang dikembangkan sejak 2015 sebagai bagian dari program Nawacita. Menurut Kementerian PUPR (2018), pembangunan PLBN bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan lintas negara sekaligus mendorong pembangunan kawasan perbatasan melalui pengembangan infrastruktur pendukung. Namun demikian, studi oleh Nugroho et al. (2019) menunjukkan bahwa pembangunan fisik PLBN tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam banyak kasus, terjadi ketimpangan antara megastruktur PLBN dan kondisi minimnya infrastruktur dasar di desa-desa sekitar. Hal ini menimbulkan kritik bahwa pembangunan PLBN cenderung bersifat simbolis dan belum menyentuh substansi kebutuhan masyarakat lokal.

## Kesenjangan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan

Kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah perbatasan menjadi isu utama dalam studi pembangunan regional. Menurut Kuncoro (2010), pembangunan infrastruktur yang tidak merata berisiko memperlebar ketimpangan antarwilayah. Di kawasan perbatasan, hal ini terlihat dari rendahnya akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan. Studi oleh Bappenas (2020) mencatat bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka kemiskinan di wilayah perbatasan cenderung lebih buruk dibandingkan rata-rata nasional. Dalam konteks Wutung, meskipun berada dekat dengan PLBN Skouw, masyarakat setempat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, seperti jalan desa yang rusak, kurangnya jaringan air bersih dan listrik yang stabil, serta terbatasnya layanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk meninjau ulang pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.

## Pendekatan Pembangunan Wilayah Terpadu dan Inklusif

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, sejumlah pendekatan telah dikembangkan, termasuk pendekatan pembangunan wilayah terpadu dan partisipatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat lokal dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan (Friedmann, 1992). Pembangunan berbasis kebutuhan lokal (community-based development) dianggap lebih efektif dalam menjawab masalah struktural yang dihadapi masyarakat perbatasan, karena melibatkan mereka dalam proses perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah melalui BNPP dan kementerian/lembaga teknis telah mencoba mengintegrasikan pembangunan PLBN dengan pengembangan ekonomi lokal melalui penguatan pasar perbatasan, pengembangan UMKM, dan pelatihan vokasi. Namun upaya ini masih terbatas cakupannya dan perlu didukung oleh investasi jangka panjang dalam infrastruktur dasar.

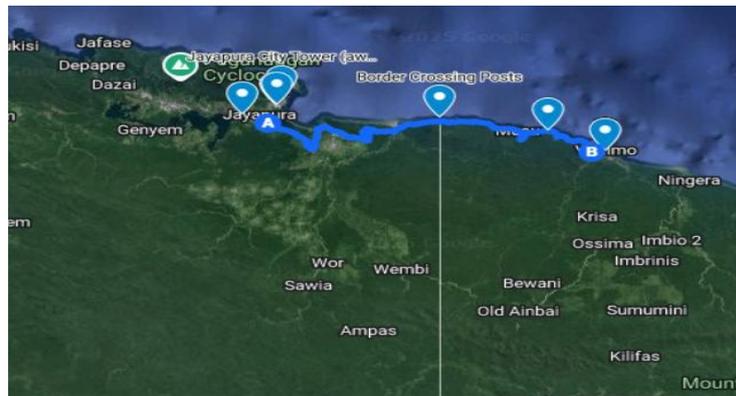
## **Metode Penelitian**

### Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi aktual infrastruktur dasar di wilayah perbatasan, khususnya di Kampung Wutung, Jayapura. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, geografis, dan kebijakan yang melingkupi kawasan perbatasan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dengan fokus tunggal pada Kampung Wutung sebagai lokasi representatif untuk menggambarkan kondisi kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan berada dalam lingkup Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik khas wilayah perbatasan, berada dalam zona pengaruh PLBN Skouw, serta menjadi titik strategis dalam interaksi lintas negara Indonesia–Papua Nugini.



**Gambar 1. Lokasi Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 3 bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

#### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### Data Primer

Data primer diperoleh melalui:

- Observasi lapangan langsung, untuk mengidentifikasi kondisi fisik infrastruktur dasar seperti jalan, sumber air bersih, fasilitas kesehatan, sekolah, dan jaringan listrik.
- Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang meliputi:
  - Aparat kampung (kepala kampung, sekretaris kampung)
  - Perwakilan masyarakat lokal
  - Petugas teknis dari dinas terkait (PU, Kesehatan, Pendidikan)
  - Pengelola PLBN Skouw
- Diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan warga lokal untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka terkait akses dan kualitas infrastruktur dasar.

##### Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti:

- Dokumen perencanaan dan laporan program pembangunan dari instansi pemerintah (Bappeda, BNPP, Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan)
- Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura dan Provinsi Papua
- Laporan penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, dan dokumen peraturan/kebijakan pembangunan wilayah perbatasan

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### Kondisi Umum Wilayah

Kampung Wutung terletak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, dan merupakan salah satu kampung yang paling dekat dengan PLBN Skouw. Meskipun PLBN telah mengalami pembangunan signifikan, sebagian besar infrastruktur dasar di kampung ini masih belum berkembang optimal. Kampung Wutung adalah salah satu kampung perbatasan yang terletak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kampung ini memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini dan berada di jalur utama menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. Wilayah ini berfungsi sebagai pintu gerbang resmi keluar-masuk orang dan barang antara Indonesia dan Papua Nugini, serta menjadi simbol kedaulatan dan eksistensi negara di tapal batas timur

Indonesia. Secara administratif, Kampung Wutung berada di wilayah paling timur Kota Jayapura dan merupakan bagian dari kawasan perbatasan yang masuk dalam program prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat. Namun, secara fungsional dan dalam kehidupan sehari-hari, kampung ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan sosial ekonomi yang kompleks. Kampung ini dihuni oleh sekitar 300–400 jiwa dengan komposisi masyarakat yang mayoritas merupakan suku asli Papua serta beberapa pendatang yang berprofesi sebagai pegawai PLBN, TNI, atau pedagang kecil. Infrastruktur dasar di Kampung Wutung masih tergolong minim. Sistem jalan lingkungan tidak memadai, akses air bersih sangat terbatas dan mengandalkan sumur gali atau penampungan air hujan, jaringan listrik sering mengalami pemadaman, dan layanan kesehatan hanya tersedia melalui satu Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tidak dilengkapi dengan tenaga medis tetap atau fasilitas rawat inap. Layanan pendidikan formal hanya tersedia hingga tingkat sekolah dasar (SD), sementara siswa SMP dan SMA harus menempuh perjalanan ke Skouw atau Abepura. Akses komunikasi juga menjadi kendala utama. Sinyal telepon seluler tidak stabil, dan internet hampir tidak dapat diakses dari rumah warga. Hal ini menyebabkan keterisolasian digital dan menjadi penghambat dalam mengakses informasi, layanan publik daring, serta pengembangan kapasitas masyarakat, terutama generasi muda.

#### Potensi dan Tantangan Pembangunan

**Tabel 1. Kondisi Infrastruktur Dasar di Kampung Wutung (2024)**

Jenis Infrastruktur	Ketersediaan	Kondisi Fisik	Catatan
Jalan kampung	Ada	Rusak sedang	Aspal tidak merata, sebagian berlubang
Air bersih	Terbatas	Tidak stabil	Mengandalkan sumur dan tadah hujan
Listrik	Ada	Tidak stabil	Sering padam, hanya pada malam hari
Fasilitas kesehatan	Ada (Pustu)	Terbatas	Tidak selalu ada tenaga medis, tidak ada rawat inap
Pendidikan	Ada (SD)	Cukup	Hanya sampai tingkat SD, siswa SMP ke Skouw
Sanitasi (jamban)	Ada	Kurang layak	Banyak rumah belum memiliki sanitasi sehat
Sinyal komunikasi	Terbatas	Lemah	Sinyal seluler tidak stabil, internet sangat lambat

Secara umum, Kampung Wutung memiliki potensi untuk berkembang menjadi kawasan pertumbuhan baru di wilayah perbatasan timur Indonesia. Letaknya yang strategis dan keberadaan PLBN dapat menjadi modal awal bagi pengembangan ekonomi lintas batas, pariwisata perbatasan, serta penguatan ketahanan sosial-budaya. Namun, hal tersebut hanya dapat tercapai apabila dibarengi dengan peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penguatan kelembagaan kampung. Tantangan utama yang dihadapi Kampung Wutung adalah ketimpangan antara pembangunan makro (nasional) dan kebutuhan mikro (lokal). Masyarakat merasa bahwa kehadiran infrastruktur negara seperti

PLBN tidak diiringi dengan perbaikan kualitas hidup sehari-hari mereka. Ketimpangan ini, jika tidak segera ditangani, dapat memperbesar ketidakpuasan masyarakat dan berpotensi melemahkan integrasi sosial serta loyalitas terhadap program-program pemerintah pusat.

**Dampak Pembangunan PLBN Skouw terhadap Kampung Wutung**

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw merupakan bagian dari program strategis nasional dalam rangka memperkuat kedaulatan negara, mengintegrasikan kawasan perbatasan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. PLBN Skouw dibangun megah dan modern, dilengkapi dengan berbagai fasilitas imigrasi, perdagangan, dan pelayanan publik yang menandai kehadiran negara di garis batas wilayah. Namun, di balik kemegahan infrastruktur tersebut, terdapat realitas sosial dan ekonomi yang berbeda yang dialami oleh masyarakat Kampung Wutung, kampung yang hanya berjarak kurang dari 2 km dari lokasi PLBN.

**Dampak Infrastruktur Fisik**

Secara fisik, pembangunan PLBN membawa sejumlah perubahan positif bagi kawasan sekitarnya. Salah satu dampak paling nyata adalah adanya perbaikan jalan utama dari Kota Jayapura menuju Skouw yang turut meningkatkan aksesibilitas ke Kampung Wutung. Jalan ini sebelumnya rusak parah dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Namun demikian, peningkatan ini belum menjangkau infrastruktur dalam kampung. Sebagian besar jalan lingkungan di Wutung masih berupa jalan tanah atau aspal yang rusak, dan belum tersentuh perbaikan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang dibangun masih bersifat terfokus pada pusat pelayanan PLBN dan belum merambah wilayah hunian masyarakat sekitar.

**Dampak Sosial dan Identitas Kultural**

Dari segi sosial, PLBN menjadi simbol nasionalisme dan representasi negara di perbatasan. Masyarakat Wutung secara umum merasa bangga karena kampung mereka menjadi bagian dari lokasi strategis nasional. Namun, di sisi lain, terdapat juga perasaan terpinggirkan dan tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan dan pengelolaan kawasan PLBN. Proses pembangunan yang bersifat top-down menyebabkan masyarakat lokal hanya menjadi penonton dalam perubahan besar yang terjadi di wilayah mereka. Lebih lanjut, identitas sosial budaya masyarakat Wutung memiliki keterikatan yang kuat dengan komunitas di Papua Nugini, terutama karena adanya garis keturunan, praktik adat, dan aktivitas ekonomi tradisional yang berlangsung lintas batas. Pembangunan PLBN dengan sistem pengawasan ketat terhadap perlintasan dan perdagangan antarnegara secara tidak langsung membatasi ruang gerak interaksi kultural masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam harmonisasi antara pendekatan keamanan negara dengan pelestarian budaya lokal.

**Dampak Ekonomi: Peluang dan Keterbatasan**

Pembangunan PLBN pada dasarnya diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru melalui perdagangan lintas batas, peningkatan mobilitas barang dan jasa, serta pengembangan kawasan ekonomi perbatasan. Namun, kenyataannya, dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat Wutung belum signifikan. Kegiatan ekonomi masih bersifat informal dan terbatas pada usaha kecil seperti warung makan, kios sembako, atau jasa ojek

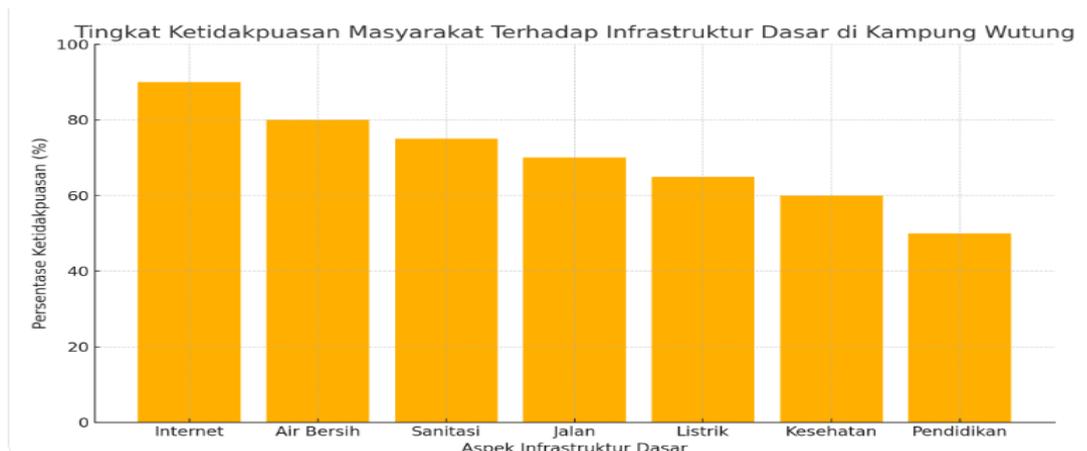
lokal. Akses masyarakat terhadap peluang ekonomi di dalam kawasan PLBN juga terbatas akibat kurangnya informasi, modal usaha, serta kapasitas sumber daya manusia yang relevan. Wawancara dengan beberapa pelaku usaha lokal mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan lalu lintas orang dan barang di sekitar PLBN, tidak banyak dari mereka yang merasakan peningkatan omzet yang signifikan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan ekonomi di PLBN dikuasai oleh pelaku usaha dari luar kampung yang memiliki akses perizinan, logistik, dan jejaring bisnis yang lebih baik. Akibatnya, masyarakat Wutung lebih sering menjadi konsumen dari pergerakan ekonomi PLBN, bukan pelaku utamanya.

**Dampak terhadap Pelayanan Publik dan Kesejahteraan**

Pembangunan PLBN juga diharapkan menjadi katalisator perbaikan pelayanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa layanan dasar di Kampung Wutung belum mengalami peningkatan yang signifikan. Fasilitas kesehatan masih terbatas pada Pustu dengan layanan yang tidak kontinu, dan pendidikan hanya tersedia hingga jenjang SD. Tidak ada peningkatan signifikan terhadap akses air bersih, sanitasi, dan koneksi internet – semua masih menjadi masalah utama bagi masyarakat. Ketimpangan antara pembangunan fisik yang megah di PLBN dan kondisi keseharian masyarakat Wutung menimbulkan kesenjangan persepsi terhadap keberpihakan pembangunan. Masyarakat menilai bahwa pembangunan lebih memprioritaskan aspek simbolik ketimbang kesejahteraan warga lokal. Hal ini sejalan dengan kritik yang disampaikan dalam berbagai literatur perbatasan (misalnya dalam studi oleh Vel & Wilson, 2017) yang menyebutkan bahwa proyek-proyek negara di kawasan perbatasan sering kali gagal menyentuh akar permasalahan sosial ekonomi masyarakat lokal karena minimnya partisipasi dan pendekatan berbasis kebutuhan riil.

**Tabel 2. Persepsi Dampak PLBN terhadap Kehidupan Masyarakat**

Aspek	Positif (%)	Negatif (%)	Netral (%)
Aksesibilitas Jalan	60	20	20
Peluang Ekonomi	45	30	25
Harga Barang Pokok	30	55	15
Ketenangan Sosial	40	35	25



**Gambar 2. Hasil Tingkat Kepuasan Masyarakat**

### Kesenjangan antara Simbol Pembangunan dan Kebutuhan Riil Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw sebagai proyek strategis nasional, dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kampung Wutung masih terbatas. Hal ini sejalan dengan temuan Nugroho et al. (2019) bahwa infrastruktur megastruktur di kawasan perbatasan sering kali lebih bersifat simbolis ketimbang fungsional bagi penduduk lokal. Masyarakat Wutung masih menghadapi berbagai kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari jalan kampung yang rusak, terbatasnya pasokan air bersih dan listrik, hingga minimnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Padahal, infrastruktur dasar merupakan prasyarat bagi berkembangnya kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru (BNPP, 2020). Pembangunan infrastruktur negara di wilayah perbatasan seperti PLBN Skouw di Jayapura menjadi representasi kuat dari kehadiran dan kedaulatan negara. Namun, simbol-simbol pembangunan ini tidak selalu linier dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat. Kampung Wutung sebagai kampung yang berada tepat di kawasan perbatasan, menjadi contoh nyata adanya kesenjangan antara pencitraan pembangunan yang masif dan kenyataan sosial ekonomi yang dialami warga lokal sehari-hari. PLBN Skouw berdiri megah dengan berbagai fasilitas modern: gedung utama imigrasi dan bea cukai, tempat ibadah, pasar modern, jalur hijau perlintasan, serta monumen negara. Secara visual dan administratif, kehadiran PLBN memperlihatkan wajah negara yang berdaya dan terorganisir di perbatasan. Media dan narasi nasional banyak menyoroati keberhasilan proyek ini sebagai bentuk transformasi perbatasan yang sebelumnya terisolasi menjadi pusat pertumbuhan baru. Namun, simbol-simbol pembangunan ini tidak serta-merta terhubung dengan transformasi kualitas hidup masyarakat Wutung secara langsung

Berdasarkan hasil survei terhadap 30 kepala keluarga di Kampung Wutung (April 2025), diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 3. Kebutuhan Riil masyarakat hasil survei lapangan**

Jenis Infrastruktur	Kondisi Saat Ini	Tingkat Ketidakpuasan (%)
Jalan Lingkungan	Tanah dan aspal rusak	70%
Air Bersih	Sumur gali, hujan	80%
Listrik	Sering padam, tidak stabil	65%
Layanan Kesehatan	Pustu tidak aktif	60%
Pendidikan	Hanya tersedia SD	50%
Sanitasi	Tidak ada sistem pembuangan	75%
Internet/Komunikasi	Sinyal tidak stabil, mahal	90%

Beberapa faktor utama penyebab kesenjangan antara simbol pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat antara lain:

- Pendekatan Top-Down: Pembangunan PLBN dilakukan tanpa konsultasi dan partisipasi aktif masyarakat sekitar.
- Fokus pada Estetika dan Fungsi Negara: Prioritas utama adalah perlintasan internasional, bukan integrasi sosial-ekonomi lokal.
- Ketimpangan Akses Informasi dan Modal: Warga lokal tidak memiliki kapasitas administratif dan finansial untuk mengakses peluang usaha yang terbuka di kawasan PLBN.

- Minimnya Layanan Dasar Terintegrasi: Tidak ada sinergi antara pembangunan pusat (PLBN) dan perencanaan pembangunan kampung.

**Tabel 4. Rekomendasi Solusi dari permasalahan**

Aspek Strategis	Permasalahan Utama	Rekomendasi Solusi	Pelaksana/Pemangku Kepentingan
<b>Tata Kelola dan Perencanaan</b>	Perencanaan pembangunan kampung terpisah dari agenda nasional	Integrasikan kebutuhan kampung dalam rencana induk PLBN dan dokumen RPJMD/RKP desa	BNPP, Bappeda, Pemerintah Kota Jayapura, Kampung Wutung
<b>Infrastruktur Dasar</b>	Jalan rusak, air bersih terbatas, listrik tidak stabil	Program pendamping PLBN mencakup perbaikan jalan kampung, jaringan air bersih, sanitasi, dan listrik desa	Kementerian PUPR, PLN, Dinas PU Kota
<b>Konektivitas dan Teknologi</b>	Akses internet dan sinyal seluler sangat terbatas	Perluasan jaringan internet dan BTS melalui program BAKTI Kominfo dan dukungan infrastruktur dari PLBN	Kominfo, BAKTI, Telkomsel, Pemerintah Daerah
<b>Layanan Sosial</b>	Layanan kesehatan dan pendidikan terbatas	Penyediaan tenaga kesehatan, guru kontrak, pembangunan rumah dinas dan fasilitas pelayanan publik dasar	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemkot Jayapura
<b>Ekonomi Lokal</b>	Warga tidak terlibat dalam ekonomi PLBN	Aktivasi BUMKam, pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan perdagangan lintas batas rakyat (border trade)	Dinas UMKM, Disperindag, BUMDes, NGO lokal
<b>Fungsi PLBN</b>	PLBN terkesan eksklusif, tidak berdayakan warga sekitar	Reformulasi fungsi PLBN sebagai pusat layanan terpadu dan ekonomi rakyat perbatasan	BNPP, Kemenko Perekonomian, Imigrasi, Pemda
<b>Partisipasi Masyarakat</b>	Minim pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan	Pembentukan Forum Warga Perbatasan, pendampingan oleh perguruan tinggi dan LSM dalam penguatan kapasitas kampung	Kampung Wutung, LSM, Universitas, Pemda

## Kesimpulan

Studi ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan nyata antara pembangunan simbolik negara yang diwujudkan melalui keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw dan kondisi riil masyarakat di Kampung Wutung yang berada tepat di sekitarnya. Meskipun PLBN hadir sebagai representasi kemajuan fisik dan modernisasi perbatasan, masyarakat lokal masih mengalami berbagai keterbatasan dalam pemenuhan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, listrik, layanan kesehatan, pendidikan, dan akses komunikasi. Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga mengindikasikan kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Simbol

negara dibangun megah, namun kebutuhan dasar warga diabaikan. Realitas ini memperkuat argumen bahwa pembangunan tidak hanya membutuhkan representasi fisik, tetapi juga pendekatan inklusif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari sisi sosial, masyarakat Kampung Wutung merasa terpinggirkan dari manfaat langsung PLBN, dengan rendahnya partisipasi dalam aktivitas ekonomi maupun kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan. Hal ini menimbulkan risiko eksklusi sosial dan ketimpangan spasial yang berpotensi mengancam kohesi sosial dan rasa memiliki terhadap negara. Dengan demikian, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih integratif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal untuk memastikan bahwa kehadiran negara di wilayah perbatasan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk nyata pelayanan dan perlindungan negara.

## Referensi

- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BNPP. (2022). Profil Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Kementerian PUPR. (2021). Laporan Kinerja Infrastruktur PLBN Skouw. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.
- Kominfo. (2023). Program Penyediaan Internet di Wilayah 3T. Jakarta: BAKTI Kominfo.
- Kusworo, A. (2014). *Pembangunan dari Pinggiran: Studi Antropologi tentang Masyarakat Perbatasan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubyarto. (1999). *Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Purnama, I. W., & Susanto, H. (2019). Infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat perbatasan: Studi kasus PLBN Entikong. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 30(2), 113–125.
- Riwanto, A. (2017). *Paradoks Pembangunan Perbatasan: Antara Simbolisme dan Kesejahteraan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sulistiyono, S. T., & Rochwulaningsih, Y. (2013). Contest for hegemony: The dynamics of inland border regions in Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 44(1), 136–160.
- UNDP. (2019). *Leaving No One Behind: Human Development Report*. New York: United Nations Development Programme.